

PERAN KOMITE SEKOLAH DALAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN PENGARUHNYA TERHADAP KINERJA SEKOLAH DASAR

Bambang Soepeno

Kampus: Jl. Kalimantan III/23 Tegal Boto Jember. Rumah: Jl. Karang Setra 5 Tegal Gede Jember
e-mail: bsoepeno@yahoo.com HP 081339121699.

Abstract: The role of school comitee in developing education. The effect on elementary schools' performance. The purpose of this ex post facto reserach was to describe effect of the school comitee' role on effectivity of schools' performance. The location of the research was in Mataram, Nusa Tenggara Barat province. The research was conducted at January–April 2004. The research popilation comprized all comitee members (436 people) State Elementary Schools fund acceptors SDF (School Development Fund) 2003 years. The sample was 100 drawn population with a proportional random sampling technique. Significant test results with F-test and t-test showed (1) the role of school comitee in developing education had significant influence to schools' performance, (2)) the role of school comitee in giving advisory to schools' principle related to developing education had significant influence on schools' performance.

Abstrak: Penelitian ex post facto ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh peran komite sekolah terhadap kinerja sekolah yang efektif. Lokasi penelitian di Mataram propinsi Nusa Tenggara Barat, dilaksanakan mulai Januari s.d. April 2004. Populasi penelitian meliputi seluruh anggota komite SDN penerima dana SDF (School Development Fun) anggaran 2003 sebanyak 436. Sampel diambil 100 dari seluruh populasi dengan teknik proporsional random sampling. Hasil uji signifikansi dengan menggunakan F-test dan t-test menunjukkan (1) peran komite sekolah dalam pengembangan pendidikan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja sekolah, (2) peran komite sekolah dalam memberikan pertimbangan (advisory) kepada sekolah terkait dengan pengembangan pendidikan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja sekolah.

Kata Kunci: komite sekolah, sekolah berbasis manajemen, kinerja sekolah, SD

Perubahan paradigma pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi membuka peluang masyarakat untuk dapat meningkatkan peran-sertanya dalam pengelolaan pendidikan. Salah satu upaya untuk mewujudkan peluang tersebut adalah dibentuknya komite sekolah berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tanggal 2 April 2002. Keberadaan komite sekolah, diharapkan dapat memacu upaya pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan selaras dengan konsepsi *community-based participation* dan *School Based Management*.

Komite sekolah merupakan badan yang bersifat mandiri, tidak mempunyai hubungan hirarkhis dengan sekolah maupun lembaga pemerintah lainnya.

Komite sekolah dan sekolah memiliki kemandirian masing-masing, tetapi tetap sebagai mitra yang harus saling bekerja sama dalam pengembangan pendidikan sesuai dengan konsep dasar *School Based Management*. Di dalam SK. Mendikbud nomor 044/U/2002 disebutkan bahwa komite sekolah memiliki 4 (empat) peran pokok, yaitu; (1) sebagai *advisory agency*; (2) *supporting agemcy*; (3) *controlling agency*; dan (4) sebagai mediator antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat (Depdiknas, Dirjen Dikdasmen, 2002).

Sejak diundangkannya SK.Mendikbud nomor 044/U/2002 hingga kini keberadaan komite sekolah sudah berjalan 10 tahun. Dalam kurun waktu tersebut di daerah banyak ditemui berbagai masalah

terkait dengan program kemitraan antara sekolah dengan komite sekolah. Masing-masing institusi tersebut belum sepenuhnya memahami perannya masing-masing dan meletakkan peran tersebut dalam konteks kerjasama yang sinergis. Fenomena di daerah tersebut mendapat respons Direktorat PLP Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah pada tahun 2002/2003 diluncurkannya program *capacity building* (membangun kapasitas) pelaku pendidikan yang dikemas dalam proyek desentralisasi pendidikan dasar (*Decentralized Basic Education Project/DBEP*).

Di dalam konsep *School Based Management* mengisyaratkan tuntutan adanya perubahan yang dilandasi kesepakatan, komitmen, kesadaran, dan kesiapan multi pihak untuk mewujudkan sekolah sebagai lembaga pelayan pendidikan yang mampu memenuhi kebutuhan riil pelanggannya. Untuk mewujudkan tuntutan masyarakat tersebut sekolah memerlukan mitra kerja yang dapat merumuskan preferensi kebutuhan masyarakat, memformulasikan ke dalam program kerja, dan mengimplementasikan program kerja, serta melakukan monitoring-evaluasi pelaksanaan program kerja bersama sama dengan sekolah (Soepeno, 2000).

Komite Sekolah, yang penderiannya merujuk SK. Mendiknas nomor 044/U/2002, merupakan lembaga representasi masyarakat di tingkat sekolah bertujuan untuk (1) dapat mewartakan dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan; (2) meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan; (3) menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan (Dirjen Dikdasmen, Depdiknas, 2002).

Bertolak dari tujuan dibentuknya komite sekolah di atas, menunjukkan bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan bagian integral dari realisasi tanggung jawab sosial bagi semua pihak. Sistem tanggungjawab sosial muncul di Amerika Serikat pada dekade 1940-an. Sistem ini hasil kajian dari komisi untuk kebebasan masyarakat (*Commission on Freedom of the community*) tentang hubungan masyarakat dengan pemerintah (Fullan, M, 1991). Menggarisbawahi konsep di atas, maka dengan kebijakan desentralisasi pendidikan, seyogyanya masyarakat menangkap peluang tersebut untuk menyampaikan aspirasi dan mengintensifkan

peran sertanya dalam mewujudkan layanan pendidikan yang berkualitas, melalui perencanaan program sekolah, pelaksanaan dan kegiatan monev yang efektif. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa untuk mewujudkan kinerja sekolah salah satu diterminanya tergantung pada intensitas aktualisasi peran komite sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan.

Kinerja atau sering juga disebut unjuk kerja menurut pengertian para ahli pada dasarnya sama, namun cara memandangnya yang berlainan. Pengertian kerja ini terjemahan dari *performance*. Menurut Welliam (1980) bahwa "*Performance is the ability to perform; capacity to achieve a desired result*". Menurut Smith (1997) bahwa "*performance is out put driven from processes, human or otherwise*". Dari dua definisi tersebut dapat ditarik suatu pengertian bahwa unjuk kerja adalah kemampuan melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau suatu hasil pelaksanaan dari suatu proses kerja seseorang atau lembaga.

Pengertian unjuk kerja ini menurut Smith (1997) dapat dilihat melalui perilaku, hasil dan keefektifan organisasi. Perilaku mengacu pada kegiatan-kegiatan dalam mencapai tujuan tertentu. Perilaku individu memberikan hasil terhadap kerja. Hasilnya bersifat objektif maupun bersifat subyektif. Sedangkan keefektifan organisasi atau lembaga merupakan langkah-langkah dalam menyimpulkan kegiatan organisasi. Hal ini lebih menekankan pada aspek organisasi. Demikian pula Kast dan Ronsenzweig (1979) yang senada dengan pendapat Miskel Hoy dan (1987) mengartikan, bahwa unjuk kerja merupakan suatu kemampuan dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan yang sesuai dengan sikap, pengetahuan dan ketrampilan serta motivasi pegawai. Dalam pengertian ini, unjuk kerja juga merupakan suatu hasil kegiatan suatu organisasi atau individu yang berguna bagi pengukuran tingkat keefektifan dan efisiensi performansi organisasi. Selain itu unjuk kerja juga memiliki unsur perilaku dari diri seseorang yang ditampilkan dalam kaitannya dengan pekerjaan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa unjuk kerja adalah perilaku seseorang dalam melaksanakan fungsi dan tugas pekerjaan yang dibebankan kepadanya dalam suatu organisasi.

Menurut Flippo (1984), untuk memperoleh informasi kinerja, satu diantaranya dapat diambil dari orang yang bersangkutan dengan observasi langsung,

pengisian angket dan komunikasi verbal atau wawancara. Dalam penelitian ini kinerja sekolah sebagai organisasi pelayan pendidikan diukur dari beberapa komponen berdasarkan perspektif program desentralisasi pendidikan dasar, yaitu: (1) Komponen Konteks; (2) *Input*; (3) Proses; (4) *Output*; dan (5) *Outcomes* (Direktorat PLT, Dirjen Dikdasmen, Depdiknas, 2002).

Secara garis besar aspek-aspek yang tercakup dalam Komponen konteks, *Input*; Proses; *Output*; dan (5). *Outcomes* dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) Komponen konteks, adalah keadaan ketersediaan layanan pendidikan dan sistem manajemen di sekolah.; (2) Komponen *input* terdiri dari visi, misi, tujuan sekolah, sasaran sekolah, SDM dan SDA yang dimiliki sekolah, kurikulum dan fokus pelanggan, serta input manajemen lainnya.; (3) Komponen proses, di dalamnya meliputi aspek; proses pengambilan keputusan, proses pengelolaan kelembagaan; proses pengelolaan program; proses PBM yang efektif; proses evaluasi; proses akuntabilitas; proses keterbukaan; proses keberlanjutan; proses pengelolaan keuangan; proses kepemimpinan; proses pengelolaan lingkungan sekolah; pengelolaan manajemen SDM; proses manajemen budaya kerja; proses pemeliharaan *teamworks*; proses pengelolaan program inovatif; proses dalam merespon kebutuhan pelanggan; dan proses komunikasi antar pelaku pendidikan; (4) Komponen *output*, dapat dilihat pada aspek; prestasi akademik dan non akademik; dan (5) Komponen *outcomes*, dapat dilihat pada aspek: Dampak dari prestasi akademik dan non akademik; kelembagaan; dan respons masyarakat terhadap penyelenggaraan program sekolah.

Walaupun penelitian tentang peran komite sekolah dalam pengembangan pendidikan belum banyak dilakukan, namun demikian berikut ini ada beberapa hasil penelitian yang relevan sebagai wacana untuk membahas persoalan peran masyarakat dalam pengembangan sekolah. Subandiyah (1996) menyimpulkan hasil penelitiannya bahwa tertanamnya kepercayaan masyarakat terhadap perubahan kebijakan pendidikan secara mendalam, di mana masyarakat menginginkan perubahan tersebut maka masyarakat akan membuat dan melaksanakan tuntutan perubahan itu secara baik, yang diikuti dengan perasaan dan sikap *receptive*, responsif dan adaptif. Kepercayaan, keyakinan dan kepastian dalam melakukan kegiatan merupakan hal yang berpengaruh pada keberhasilan sekolah merealisasikan program-program kerjanya. Apabila masyarakat bekerja atas

dasar kepercayaan dan kepastian seperti itu maka akan berhasil dengan baik usaha yang dilakukan, sebaliknya jika masyarakat tanpa dilandasi dengan kepercayaan, keyakinan, dan kepastian maka hasil-nyapun tidak akan sesuai dengan yang diharapkan.

Sedangkan dari hasil penelitian Soepeno (2000) mengidentifikasi beberapa kendala yang dapat mempengaruhi keberhasilan upaya pengembangan sekolah dan inovasi pendidikan pada umumnya. Adapun kendala utama yang dapat menghambat jalannya inovasi di antaranya ialah (1) estimasi yang tidak tepat terhadap inovasi; (2) konflik dan motivasi yang kurang sehat; (3) lemahnya berbagai faktor penunjang sehingga mengakibatkan tidak berkembangnya inovasi yang dihasilkan; (4) Masalah keuangan (finansial) yang tidak memenuhi; dan (5) kurang adanya hubungan sosial dan publikasi.

Terkait dengan hal di atas Gilltte dan Mc. Collom (1990) dalam penelitiannya tentang pengembangan organisasi, menyimpulkan, bahwa dari 5 level pola interaksi (*intrapersonal level, interpersonal level, group level, intergroup level, dan interorganizational level*) yang mempunyai hubungan fungsional paling kuat dengan keefektifan kinerja pendidikan adalah pola interaksi *interorganizational*. Selanjutnya hasil penelitian Good and Carter (1997) menyarankan bahwa dalam rangka memberdayakan potensi masyarakat dalam pengembangan pendidikan, hendaknya memperhatikan 4 (empat) ciri sebagai berikut; (1) *Community organization*, yang dilakukan dengan cara mengorganisir kelompok di masyarakat; (2) *Worker self-management and collaboration*, yang bertujuan untuk menyamaratakan atau membagi kewenangan dalam gabungan kerja; (3) *Participatory approach*, bertujuan agar masyarakat bisa dan mampu mengendalikan sifat dan arah perubahan hidupnya; (4) *Education for justice*, yang bertujuan membantu masyarakat untuk menjadi sadar akan ketidakadilan dan mampu menghadapi suatu ketidakadilan.

Berdasarkan temuan-temuan penelitian tersebut di atas, secara garis besar dapat disimpulkan bahwa keterlibatan masyarakat atau organisasi kemasyarakatan mempunyai kontribusi besar terhadap keberhasilan sekolah/lembaga pendidikan dalam melaksanakan program kerjanya. Di mana hubungan pola interaksi interorganisasional yang mempunyai pengaruh besar terhadap pengembangan pendidikan.

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang hendak dikaji atau dijawab melalui penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut; (1) Apakah peran komite sebagai *advisory agency* berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja di sekolah?; (2) Apakah peran komite sebagai *supporting agency* berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja sekolah?; (3) Apakah peran komite sebagai *controlling agency* berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja sekolah?; dan (4) Apakah peran komite sebagai mediator antara masyarakat dan sekolah berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja sekolah?

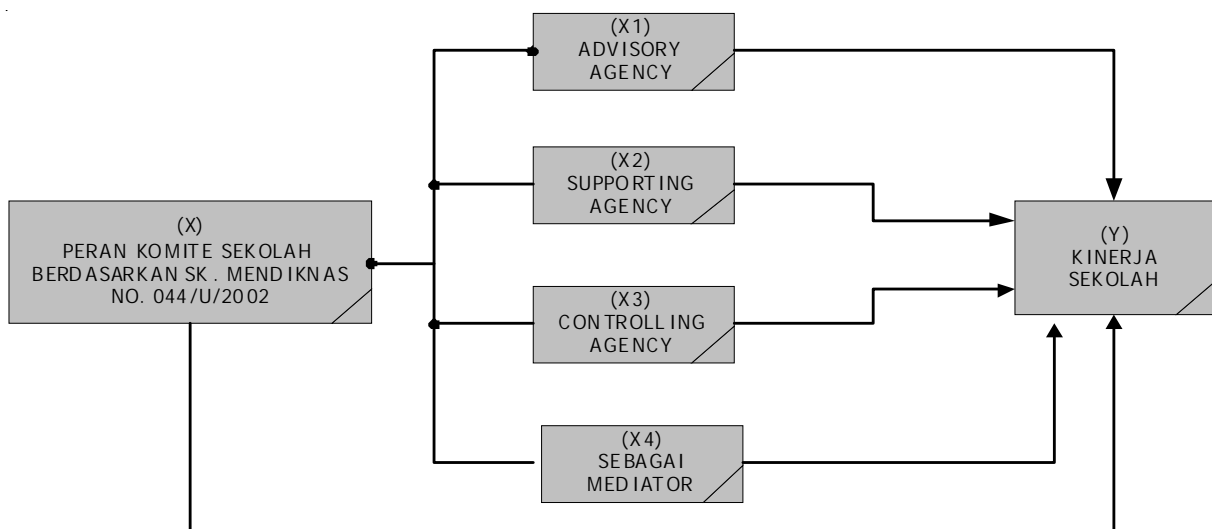
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauhmana pengaruh peran komite sekolah terhadap kinerja sekolah yang efektif, yang dapat dirinci, sebagai berikut: (1) Ingin mengetahui peran komite sekolah sebagai *advisory agency* dalam penyelenggaraan program sekolah, dan pengaruhnya terhadap peningkatan kinerja sekolah; (2) Ingin mengetahui peran komite sekolah sebagai *supporting agency* dalam penyelenggaraan program sekolah, dan pengaruhnya terhadap peningkatan kinerja sekolah. (3) Ingin mengetahui peran komite sekolah sebagai *controlling agency* dalam penyelenggaraan program sekolah, dan pengaruhnya terhadap peningkatan kinerja sekolah; dan (4) Ingin mengetahui peran komite sekolah sebagai mediator antara masyarakat dengan sekolah dalam penyelenggaraan program sekolah, dan pengaruhnya terhadap peningkatan kinerja sekolah.

METODE

Penelitian ini menggunakan rancangan *expost facto*, karena data penelitian yang akan dianalisis bukan merupakan hasil dari perlakuan (*treatment*) peneliti, tetapi data tersebut sudah ada di lapang sebelum dilakukan penelitian atau peristiwanya telah berlalu kemudian peneliti mengumpulkan data dari peristiwa tersebut. Data yang telah terkumpul tersebut kemudian dianalisis dan diinterpretasikan. Sedangkan hubungan antar variable penelitian dalam studi ini dapat dibayangkan sebagaimana bagan 1.

Penelitian ini diselenggarakan di kota Mataram propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), tepatnya di 3 (tiga) kecamatan, yaitu Kecamatan Mataram, Ampenan dan kecamatan Cakranegara. Sedangkan waktu yang diperlukan untuk melaksanakan penelitian ini adalah 4 (empat) bulan, yaitu mulai bulan Januari sampai dengan April 2004.

Populasi penelitian ini adalah seluruh anggota komite Sekolah Dasar Negeri penerima dana SDF (*School Development Fun*) untuk tahun anggaran 2003. Sedangkan sampel penelitian secara quota ditetapkan sebanyak 100 responden dari keseluruhan anggota komite sekolah pada SDN yang tersebar di 3 (tiga) kecamatan, yaitu kecamatan Ampenan, Mataram dan kecamatan Cakranegara. Di mana penetapan sampel penelitian tersebut menggunakan teknik proporsional *random sampling*. Berikut disajikan daftar populasi dan sampel penelitian yang tersebar pada SDN di tiga kecamatan kota Mataram.



Bagan 1. Pengaruh Antar Variabel Penelitian

Keterangan:

- Jumlah Anggota Komite Sekolah Dasar berentang 9 s/d 15 Orang/SDN
- Sumber Data dari Lapang dikonfirmasi dengan data hasil Monev.

Tabel 1. Daftar Sebaran Populasi dan Sampel Penelitian Anggota Komite Sekolah

NO	KECAMATAN	SEKOLAH	JUMLAH	
			POPULASI	SAMPEL
1	Ampenan	16 SDN	170 Orang	39 Orang
2	Mataran	12 SDN	130 Orang	30 Orang
3	Cakranegara	13 SDN	136 Orang	31 Orang
JUMLAH		41 SDN	436 Orang	100 Orang

Sumber data primer diambil dari responden penelitian, yakni anggota komite sekolah. Sedangkan data penunjang lainnya diambil dari beberapa sumber, antara lain adalah dari hasil wawancara dengan Kepala Sekolah, guru dan tenaga administrasi sekolah. Sedangkan data penunjang yang bersumber dari dokumen, diambil dari Kantor Cabang Dinas

Pendidikan kecamatan dan dokumen yang ada disekolah. Data penunjang tersebut disamping untuk melengkapi data primer, juga sebagai dasar untuk melakukan klarifikasi dan konfirmasi apakah data primer yang diperoleh dari komite sekolah melalui angket dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Tabel 2. Deskripsi Aspek dan Indikator Angket Peran Komite Sekolah

NO	PERAN KOMITE SEKOLAH	ASPEK-ASPEK	JUMLAH ITEM
1	<i>Advisory agency</i> (Pemberi pertimbangan)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertimbangan dalam membuat keputusan tentang rencana program kerja sekolah ▪ Pertimbangan dalam membuat keputusan tentang rencana anggaran pendidikan ▪ Pertimbangan dalam menentukan skala prioritas program kerja sekolah ▪ Pertimbangan dalam merumuskan kriteria kinerja sekolah ▪ Pertimbangan dalam merumuskan kriteria tenaga kependidikan ▪ Pertimbangan dalam merumuskan kriteria fasilitas belajar yang memadahi untuk menciptakan PMB yang efektif 	<p>4 item</p> <p>5 item</p> <p>4 item</p> <p>6 item</p> <p>6 item</p> <p>5 item</p>
2	<i>Supporting agency</i> (Memndukung)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menjalin kerja kemitraan antara sekolah dengan lembaga lain dan <i>stakeholders</i> ▪ Penggalangan dana dari masyarakat untuk pembiayaan pendidikan ▪ Pemanfaatan sumber belajar yang ada di masyarakat 	<p>5 item</p> <p>4 item</p> <p>6 item</p>
3	<i>Controlling agency</i> (Pengontrol)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program sekolah ▪ Melakukan monev penggunaan dana sekolah ▪ Melakukan monev terhadap penyelenggaraan PBM ▪ Melakukan monev terhadap kualitas lulusan 	<p>4 item</p> <p>6 item</p> <p>6 item</p> <p>4 item</p>
4	Sebagai mediator Antara masyarakat dan sekolah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mediator penyampaian aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan masyarakat kepada sekolah ▪ Mediator antara kelembagaan masyarakat dengan sekolah dalam rangka pengembangan pendidikan ▪ Mediator antara dunis industri/dunia usaha dengan sekolah terkait dengan program muatan lokal dan penggalangan dana pendidikan 	<p>8 item</p> <p>5 item</p> <p>7 item</p>

Tabel 3. Deskripsi Aspek dan Indikator Angket Kinerja Sekolah

NO	DIMENSI KINERJA SEKOLAH	ASPEK-ASPEK	JUMLAH ITEM
1	Konteks	▪ Kesesuaian program sekolah dengan kondisi/potensi geografis dan demografis	4 item
		▪ Kesesuaian program sekolah dengan kebutuhan pendidikan masyarakat	5 item
		▪ Dukungan atau partisipasi masyarakat	4 item
		▪ Kebijkaksanaan pemerintah	5 item
		▪ Aspirasi masyarakat terhadap pendidikan	6 item
2	Input	▪ Status sosial masyarakat	5 item
		▪ Visi, misi, tujuan dan sasaran sekolah	5 item
		▪ Program sekolah	4 item
		▪ Sumberdaya sekolah	4 item
		▪ Kondisi/potensi peserta didik	4 item
		▪ Kemandirian sekolah	6 item
		▪ Potensi dan kondisi pendaan program sekolah	4 item
		▪ Kesesuaian kurikulum muatan lokal dengan kebutuhan masyarakat	6 item
		▪ Fokus layanan kepada pelanggan	6 item
		▪ Kompetensi dan didikasi staf sekolah	6 item
3	Proses	▪ Kemampuan manajerial sekolah	4 item
		▪ Proses pengambilan keputusan	4 item
		▪ Proses pengelolaan kelembagaan	3 item
		▪ Proses pengelolaan program	6 item
		▪ Proses pembelajaran	6 item
		▪ Proses evaluasi	4 item
		▪ Proses kerjasama dan partisipasi	3 item
		▪ Proses akuntabilitas	4 item
		▪ Proses kemandirian sekolah	4 item
		▪ Proses keberlanjutan (Sustainbilitas)	3 item
		▪ Proses merespon aspirasi dan tuntutan masyarakat	4 item
		▪ Proses komunikasi sekolah	3 item
		4	Output
▪ Kualitas non akademik kelulusan	5 item		
5	Outcomes	▪ Dampak dari kualitas akademik lulusan	5 item
		▪ Dampak dari kualitas non-akademik lulusan	5 item
		▪ Dampak bagi masyarakat atas kualitas lulusan	5 item

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data primer tentang peran komite sekolah dan kinerja sekolah. Berikut disajikan kisi-kisi dari kedua angket di atas setelah dilakukan analisis validitas dan reliabilitas instrument.

Teknik wawancara digunakan untuk melakukan konfirmasi mengenai hasil pengisian angket, dan juga digunakan untuk mendapatkan informasi pelengkap data primer yang diperoleh dari hasil angket. Sedangkan observasi dalam penelitian ini berfungsi untuk mengamati berbagai proses kegiatan penyelenggaraan persekolahan.

Data yang diperoleh dari dokumen adalah informasi mengenai berbagai hal yang tidak mungkin

dapat digali dengan teknik angket, wawancara dan observasi, karena data di sini merupakan hasil catatan berbagai kegiatan persekolahan di masa lalu yang tersampaikan.

Untuk keperluan analisis data digunakan dua macam rumusan statistik, yakni F-test dan t-test. Adapun formulasi rumusannya adalah sebagai berikut.

$$F\text{-test} = \frac{MSb}{MSw} \dots\dots\dots (\text{Soepeno, 1997})$$

MSb = Mean antarkelompok
MSw = Mean dalam kelompok

Untuk mencari signifikansi pengaruh antar variabel, dilakukan dengan cara mengkonsultasikan hasil perhitungan F-test dengan tabel kritik F yang mengacu pada db (derajat kebebasan) = $k - 1$. Sedangkan taraf kepercayaan yang dipakai dalam analisis ini adalah taraf kepercayaan 95%. Dengan demikian maka, jika di dalam analisis data penelitian ini ada kesalahan, maka tingkat kesalahan/kesesatan tersebut sebesar 5%.

Sedangkan formulasi rumusan t-test atau Uji-t adalah sebagai berikut (Soepeno, 1997).

$$t\text{-test} = \frac{\text{Mean}_1 - \text{Mean}_2}{\sqrt{\left\{ \frac{X_1^2}{n_1} + \frac{X_2^2}{n_2} - \frac{(X_1 + X_2)^2}{n_1 + n_2} \right\} \left\{ \frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right\}}}$$

Mean = Rata-rata dari kelompok sampel
X = Jumlah nilai sampel penelitian
n = Jumlah sampel

Tes signifikansi rumusan t-test ini dilakukan dengan cara mengkonsultasikan hasil perhitungan statistik dengan harga t dalam tabel kritik dengan acuan derajat kebebasan (db) = $n_1 + n_2 - 2$. Adapun taraf kepercayaan yang dipakai dalam analisis ini adalah taraf kepercayaan 95%. Artinya bahwa, jika terjadi kesalahan perhitungan dalam analisis data penelitian ini, titik kesesatannya adalah sebesar 5%.

HASIL

Kualifikasi Peran Komite dan Kinerja Sekolah

Kualifikasi peran anggota komite sekolah pada penelitian ini dikategorikan menjadi dua, yakni baik dan kurang. Pengkualifikasian tersebut ditetapkan berdasarkan rerata skor yang diperoleh dari jumlah skor masing-masing anggota komite sekolah dalam satuan wilayah kecamatan. Kualifikasi "baik" apabila jumlah skor anggota komite sekolah berada di atas atau sama dengan skor rata-rata. Sedangkan kualifikasi peran "kurang" apabila jumlah skornya di bawah rata-rata.

Untuk menetapkan kualifikasi kinerja sekolah prosedurnya sama dengan prosedur penetapan

kualifikasi peran anggota komite sekolah. Berdasarkan nilai rata-rata jumlah skor dari pengisian angket dapat dikategorikan rentangan kinerja sekolah sebagaimana tabel 5.

Analisis Data

Berikut disajikan rincian hasil analisis data mengenai pengaruh peran komite sekolah terhadap kinerja sekolah.

- Pengaruh Peran Komite Sekolah Dalam Pengembangan Pendidikan Terhadap Kinerja Sekolah

Pada tabel 7, menunjukkan bahwa F-test hasil perhitungan statistik jauh lebih besar dari harga kritik untuk taraf signifikansi 5% ($14.6 > 3.18$). Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa, peran komite sekolah dalam pengembangan pendidikan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja sekolah.

- Peran Komite Sekolah dalam memberi *Advisory* kepada Sekolah Pengaruhnya Terhadap Kinerja Sekolah

Berdasarkan analisis data pada tabel 8, tampak bahwa hasil perhitungan t-test jauh lebih besar dibandingkan dengan harga kritik pada taraf kepercayaan 5%. ($11.13 > 1.725$), sehingga dapat diinterpretasikan, bahwa peran komite sekolah dalam memberi pertimbangan (*advisory*) kepada sekolah terkait dengan pengembangan pendidikan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja sekolah.

Pengaruh Peran Komite Sekolah dalam Memberi Support terhadap Kinerja Sekolah

Pada tabel 9, menunjukkan bahwa t-test hasil perhitungan jauh lebih besar dibandingkan dengan harga kritik pada taraf kepercayaan 5% ($2.56 > 1.684$), maka dapat diinterpretasikan bahwa peran komite sekolah dalam memberi *support* dalam mengembangkan pendidikan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja sekolah.

Tabel 4. Kualifikasi Peran Komite Sekolah Dalam Pengembangan Pendidikan

NO	KECAMATAN	JUMLAH KOMITE SEKOLAH	KUALIFIKASI PERAN KOMITE SEKOLAH SECARA TIM/SEKOLAH	
			BAIK	KURANG
1	Ampenan	39 Orang	30 orang (79,2%)	9 Orang (20,8%)
2	Mataram	30 Orang	25 Orang (83%)	5 Orang (17%)
3	Cakranegara	31 Orang	26 Orang (84%)	5 Orang (16%)
JUMLAH SAMPEL		100 Orang	81 Orang (81%)	19 Orang (19%)

Tabel 5. Daftar Kualifikasi Kinerja Sekolah

NO	SDN KECAMATAN	DIEMENSI KINERJA	NILAI RATA-RATA DAN KUALIFIKASI KINERJA	
			RATA-RARA SKOR	KUALIFIKASI KINERJA
1	Ampenan (16 Sekolah)	▪ Konteks	3,5	Baik (3,28)
		▪ <i>Input</i>	3,6	
		▪ Proses	3,2	
		▪ <i>Output</i>	3,0	
		▪ <i>Outcomes</i>	3,1	
2	Mataram (12 Sekolah)	▪ Konteks	3,5	Sangat Baik (3,58)
		▪ <i>Input</i>	3,4	
		▪ Proses	3,8	
		▪ <i>Output</i>	3,7	
		▪ <i>Outcomes</i>	3,5	
3	Cakranegara (13 Sekolah)	▪ Konteks	3,6	Sangat Baik (3,52)
		▪ <i>Input</i>	3,5	
		▪ Proses	3,6	
		▪ <i>Output</i>	3,4	
		▪ <i>Outcomes</i>	3,5	

Keterangan:

Sangat Baik = 3,6 – 4,0 Cukup = 2,6 – 2,9
Baik = 3,0 – 3,5 Kurang = 2,0 – 2,5

Tabel 6. Hasil Analisis Statistik Dasar tentang Pengaruh Peran Komite Sekolah dalam Pengembangan Pendidikan terhadap Kinerja sekolah

PENGARUH ANTAR VARIABEL	ΣX	<i>Mean</i>	Σx^2 (Deviasi)	nd^2_{tot}
Pengaruh Peran <i>advisory</i> komite sekolah terhadap kinerja sekolah	966	80.5	250.75	21.87
Pengaruh <i>supporting</i> komite sekolah terhadap kinerja sekolah	805	89.4	166.5	570
Pengaruh <i>controlling</i> komite sekolah terhadap kinerja sekolah	2197	78.5	696.25	314
Pengaruh peran mediasi komite sekolah terhadap kinerja sekolah	747	79	21.5	48.7
NILAI TOTAL	$\Sigma X_{tot} :$ 4715	$Mean_{tot} :$ 81.85	$\Sigma x^2_{tot} :$ 1135	$nd^2_{tot} :$ 954.57

Tabel 7. Rekapitulasi Hasil Analisis Varians Pengaruh Peran Komite Sekolah terhadap Kinerja Sekolah

SUMBER VARIANSI	JUMLAH KUADRAD	DERAJAD KEBEBASAN	KUADRAD <i>MEAN</i>	RATIO-F	TARAF SIGNIFIKANSI
Antar kolompok	954.57	3	318.2		Taraf signifikansi 5%
Dalam kelompok	1135	52	21.8	14.6	3.18
Keseluruhan	2089.57	55			

Pengaruh Peran Komite Sekolah dalam Pelaksanaan Kontrol dalam Penyelenggaraan Pendidikan terhadap Kinerja Sekolah

Pada Tabel 10 tampak bahwa hasil perhitungan statistik t-test lebih kecil dibanding dengan harga

kritik pada taraf kepercayaan 5% ($1.22 < 1.746$), oleh karenanya dapat ditarik interpretasi bahwa peran komite sekolah dalam melakukan *controlling* tidak pengaruh secara signifikan terhadap kinerja sekolah.

Tabel 8. Uji t (t-test) Peran Komite Sekolah dalam Memberi *Advisory* Kepada Sekolah Pengaruhnya terhadap Kinerja Sekolah

$Mean_1$	$Mean_2$	Σx^2_1	Σx^2_2	n_1+n_2	t-test	SIGNIFIKANSI
80.5	89.4	250.75	166.5	22	11.13	Db = 20 11.13 > 1.725 H ₀ ditolak

Tabel 9. Uji t (t-test) Peran Komite Sekolah dalam Memberi *Support* Kepada Sekolah Pengaruhnya terhadap Kinerja Sekolah

$Mean_1$	$Mean_2$	Σx^2_1	Σx^2_2	n_1+n_2	t-test	SIGNIFIKANSI
80.5	78.5	250.75	696.25	40	2.56	Db = 38 2.56 > 1.684 H ₀ ditolak

Tabel 10. Uji t (t-test) Peran Komite Sekolah dalam Kegiatan *Controlling* Penyelenggaraan Pendidikan Pengaruhnya terhadap Kinerja Sekolah

$Mean_1$	$Mean_2$	Σx^2_1	Σx^2_2	n_1+n_2	t-test	SIGNIFIKANSI
80.5	79	250.75	21.5	18	1.22	Db = 16 1.22 < 1.746 H ₀ diterima

Pengaruh Peran Komite Sekolah sebagai Mediator terhadap Kinerja Sekolah

anggota komite sekolah; (2) Belum tersosialisasinya secara baik mengenai peran komite sekolah, sehingga

Tabel 11. Uji t (t-test) Peran Komite Sekolah sebagai Mediator Pengaruhnya terhadap Kinerja Sekolah

$Mean_1$	$Mean_2$	Σx^2_1	Σx^2_2	n_1+n_2	t-test	SIGNIFIKANSI
89.4	78.5	166.5	696.25	38	13.63	Db = 36 13.63 > 1.684 H ₀ ditolak

Berdasarkan analisis data pada tabel 11, ternyata t-test hasil perhitungan lebih besar dibanding dengan harga kritiknya pada taraf kepercayaan 5%. (13.63 > 1.684), oleh karenanya dapat diinterpretasikan, bahwa ada pengaruh yang signifikan antara peran komite sekolah sebagai mediator terhadap kinerja sekolah.

PEMBAHASAN

Mengacu pada hasil penelitian tersebut di atas, 81% anggota komite sekolah telah mampu memerankan dirinya sebagai mitra sekolah dalam mengembangkan pendidikan disatuan wilayahnya. Sedangkan sisanya sebesar 19% adri anggota komite sekolah belum dapat sepenuhnya memerankan dirinya sebagai mitra, hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal. Antara lain adalah; (1) Sebagian besar anggota komite sekolah masih didominasi oleh para pensiunan dan guru aktif, hanya sebagian kecil saja berasal dari warga masyarakat/orang tua murid yang kurang memahami tugas dan perannya sebagai

hal ini mempengaruhi kurangnya intensitas pemahaman sebagian anggota komite sekolah tentang peran yang harus dilakukan.

Kinerja sekolah pada umumnya sudah baik, utamanya di dua kecamatan yaitu kecamatan Mataram dan Cakranegara. Di dua kecamatan tersebut secara demografis masyarakatnya kebanyakan mempunyai tingkat pendidikan cukup dan memiliki wawasan yang luas mengenai pendidikan. Berbeda dengan lingkungan sosial di kecamatan Ampenan, dimana di Ampenan sebaaian warganya adalah komunitas nelayan dan sedikit sekali yang berpendidikan. Sehingga kontribusi masyarakat di kecamatan Ampenan terhadap pengembangan pendidikan lebih rendah bila dibandingkan dengan dua kecamatan lainnya, yaitu Mataram dan cakranegara.

Hasil intepretasi penelitian ini senada (memperkuat) hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Subandiyah (1996), Gillite dan Mc. Collom (1990) yang menegaskan bahwa ada hubungan yang signifikan antara tingkat pemahaman masyarakat terhadap

kebijakan pendidikan dengan kinerja sekolah. Hal tersebut dapat diterima karena, jika dilihat 5 aspek kinerja kesemuanya terkait dengan peran masyarakat, sehingga perlu menjadi pemahaman bersama bahwa keberhasilan penyelenggaraan pendidikan tidak dapat dilepaskan secara eksklusif dengan peran dan partisipasi masyarakatnya.

Dari hasil analisis statistik di atas dapat diinterpretasikan bahwa 4 (empat) peran komite sekolah mempunyai pengaruh terhadap kinerja sekolah, yaitu perannya sebagai *advisory*, *supporter* dan *mediator*, sedangkan peran komite sekolah sebagai *controller* dalam penyelenggaraan pendidikan tidak mempengaruhi kinerja sekolah. Realita ini dapat diinterpretasikan bahwa budaya transparansi sudah berjalan baik, atau telah menginternal ke dalam diri masing-masing pelaku pendidikan. Atau bisa pula diinterpretasikan bahwa sekolah masih menganggap secara teknis operasional penyelenggaraan pendidikan merupakan kewenangannya, dan tidak diintervensi dari luar. Kondisi inilah yang menyebabkan belum terbudayakannya prinsip transparansi, sehingga mekanisme kontrol dari masyarakat belum berjalan secara baik dan bukan merupakan diterminan dari kinerja sekolah. Kebenaran dua interpretasi di atas perlu diuji secara empirik melalui penelitian lanjutan.

Kewenangan komite sekolah dalam pengembangan pendidikan yang sudah berjalan baik adalah perannya sebagai pemberi pertimbangan dalam memutuskan suatu perencanaan dan pelaksanaan program kerja (*advisory*); memberi dukungan (*supporting*) dalam pelaksanaan program, dan menjembatani hubungan antara sekolah dengan masyarakat (Duni usaha/industri dan kelompok peduli lainnya), perlu dipelihara dan ditingkatkan. Sedangkan perannya sebagai pemonitor dan evaluasi pelaksanaan program dan akuntabilitasnya perlu dilakukan kajian lebih lanjut.

Jika kendala yang berkaitan dengan belum terbudayakannya prinsip transparansi dan akuntabilitas ini benar, maka diperlukan upaya untuk meningkatkan pemahaman pelaksana pendidikan di kota Mataram melalui program sosialisasi secara lebih intensif dengan melibatkan kelompok media massa baik media elektronik (radio dan TV) maupun media cetak (surat kabar), serta memanfaatkan berbagai budaya lokal sebagai media sosialisasi. Dengan program sosialisasi yang intensif diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran (*Awareness*) dan kemauan/kesediaan warga masyarakat dan warga sekolah untuk bersama-sama menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Penyelenggaraan pendidikan yang dikembangkan sesuai dengan kebijakan desentralisasi pendidikan, esensinya adalah membudayakan prinsip-prinsip; partisipasi, demokrasi, transparansi, akuntabilitas dan prinsip keberlanjutan tanpa memandang perbedaan-perbedaan suku, agama, jenis kelamin, budaya dan adat-istiadat lainnya. Siapapun, dimanapun dan kapanpun orangnya/lembaga mempunyai kewajiban dalam penyelenggaraan pendidikan. Oleh sebab itu sebagai simpulan akhir dari pembahasan hasil penelitian ini adalah, bahwa kinerja sekolah sebagai ukuran keberhasilan penyelenggaraan pendidikan indikatornya adalah apabila pendidikan tersebut dikelola berdasarkan kesepakan antara warga masyarakat dan warga sekolah. Atau dengan arti lain, bahwa pendidikan itu dikelola oleh, dari dan untuk bersama antara masyarakat/keluarga dan pemerintah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

- 1) Sebagian besar anggota komite sekolah (81%) telah memerankan tugasnya secara baik, sedangkan sisanya sebesar 19% masih memerlukan sosialisasi mengenai peran dan fungsinya sebagai anggota komite sekolah.
- 2) Kinerja sekolah khususnya di SDN kota Mataram secara umum sudah baik, kondisi ini mendeskripsikan bahwa aspek-aspek kinerja telah dapat dipenuhi secara memadai oleh persekolahan sesuai dengan SPM (Standar Pelayanan Minimal)
- 3) Dari 4 (empat) peran utama komite sekolah sebagai mitra, hanya peran *controlling* yang tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja sekolah. Hal ini memerlukan kajian ulang secara mendalam melalui penelitian lanjutan.

Saran

Menggarisbawahi hasil simpulan penelitian tersebut di atas, ada beberapa saran dan rekomendasi untuk dipertimbangkan dalam implementasinya, saran dan rekomendasi tersebut antara lain adalah sebagai berikut.

- 1) Apabila kinerja sekolah dan peran komite sekolah yang baik tersebut sebagai dampak dari proyek Desentralisasi Pendidikan Dasar, maka pelaksana pendidikan di kota Mataram (baik dari unsur masyarakat maupun pemerintah)

- seyogyanya segera merumuskan program *exit strategy* menjelang tahap terminasi. Hal ini penting untuk menjamin keberlangsungan (*Sustainability*) suatu program pengembangan pendidikan yang mulai membaik di kota Mataram.
- 2) Pemanfaatan secara optimal para konsultan proyek di daerah dapat difungsikan untuk menyiapkan program terminasi tersebut. Sehingga ketika proyek berakhir dan para konsultan meninggalkan kota Mataram, maka para pelaksana/pelaku pendidikan di kota Mataram sudah dapat mengambil alih peran dan fungsi konsultan tersebut, dan dapat menindaklanjuti program-program kerja yang diritis oleh proyek menjadi program kerja daerah dengan dana dari APBD.
 - 3) Program sosialisasi kebijakan pendidikan dasar, harus terus-menerus dilakukan, hingga semua komunitas di wilayah kota Mataram memahami secara benar substansi dari kebijakan desentralisasi pendidikan tersebut. Dengan kesadaran yang intensif bagi semua pihak, hal tersebut merupakan pemicu untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di kota Mataram.

DAFTAR RUJUKAN

- Caldwell, B.J. 1988. *Self Managing School and Improved Learning Outcomes*, Camberra: Department of Employment, Education, Training and Youth Affairs.
- Directorate of Junior Secondary Education. 2002. *School Based Management for Quality Improvement in Education (Books 1, 2, and 3)*. Jakarta: Directorate of Junior Secondary Education, Department of National Education Indonesia.
- Fullan. M. 1991. *The New Meaning of Educational Change*. New York: Teacher Colledge Press.
- Flippo. 1984. Motivation: Theory and Practice in Educational; *Journal of Education Administration*, Vol. 1.
- Gilltte, dan Mc. Collom. 1990. *Educational Psychology*. Glenview: Scot Foresmant, New Jearsy.
- Good and Carter. 1997. *Educational Organization*, 2nd Edition, Boston. Houghton Mifflin Company.
- Miskel, C.G., and Hoy, W.K. 1987. *Education Administration*. New York: Random House, Inc.
- Kast, dan Ronsenzweig. 1979. *Administration and Supervision Educational*, Boston. Houghton Mifflin Company.
- Smith. 1997. *The New Meaning of Educational Change*. New York: McGrawHill.
- Soepeno, B. 2000. *Peluang dan Tantangan Implementasi School Based Management Dalam Konteks Otonomi Daerah* (Disampaikan dalam seminar nasional di Universitas Jember).
- , Soepeno, B. 2001, *Desentralisasi Pendidikan atau Dekosentrasi Pendidikan: Suatu Analisis Implementasi School Based Manajemen pada Pendidikan Dasar dan Menengah* (Makalah Seminar Nasional di Menpan-GTZ Jakarta).
- Soepeno, B. 1997. *Statistik Terapan: Untuk Pendidikan dan Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Penerbit Rinekacipta.
- Subandiyah. 1996. *Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pendidikan* (Studi kasus SDN di wilayah Batu-Malang), IKIP Malang.
- Wayne, and Miskel. 1978. *Educational Administration*, Boston. Houghton Mifflin Company.
- Welliam, G. 1980. *Improved Learning Teaching*. Bos ton. Houghton Mifflin Company.